



## **PENGARUH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MODERATING VARIABEL PADA BEBERAPA DESA DI KABUPATEN GORONTALO**

Walidun Husain

Universitas Negeri Gorontalo

[walidunhusain55@gmail.com](mailto:walidunhusain55@gmail.com)

Received: 1 Desember 2019; Revised: 6 Desember 2019; Accepted: 10 Desember 2019

### **ABSTRAK.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris seberapa besar pengaruh penyusunan rencana pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat desa sebagai moderating variabel secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan; menganalisis secara empiris seberapa besar pengaruh penyusunan rencana pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan; serta menganalisis secara empiris seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan. Setelah dilakukan penelitian pada sampel 110 responden pada beberapa perangkat pemerintah desa di kabupaten Gorontalo dan dengan analisis data metode MRA (*Moderated Regression Analysis*), maka diperoleh bahwa penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo.; juga variabel partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo; serta penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada partisipasi masyarakat desa sebagai Moderating Variabel yang tinggi pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat desa dapat memoderasi pengaruh penyusunan rencana pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo

**Kata Kunci:** Perencanaan Pembangunan, Pengentasan Kemiskinan, Partisipasi Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan yang digalakkan itu meliputi segenap aspek kehidupan bangsa yakni di bidang politik, ekonomi, sosial/budaya dan hankamnas. Dengan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita untuk mengatasi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010: 4).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah dari berbagai tingkat baik nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten kota tetap bertolak pada upaya pengentasan kemiskinan, dan sector pembangunan lainnya, dapat disebutkan seperti pemerintah provinsi Gorontalo selama beberapa periode pemerintahan memprioritaskan pada pengembangan sumber daya, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infra struktur di samping merealisasikan dan menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu seperti raskin, kartu pintar, JAMKESMAS, program



keluarga harapan (PKH) dan menggenjot pembangunan desa melalui dana alokasi desa, dan dana desa.

Agar pembangunan berlangsung secara merata pada seluruh desa di Indonesia, maka sejak tiga tahun terakhir oleh pemerintah pusat telah dikucurkan pula dana desa dalam jumlah kurang lebih enam puluh triliunan rupiah kepada pemerintah desa. Dana desa ini digunakan a.l untuk membangun infrastruktur desa, ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun dalam penggunaannya harus terlebih dahulu pemerintah desa menyusun APBDES dengan berlandaskan pada dokumen perencanaan pembangunan menengah desa (RPJMDES), dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDES).

Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik per 31 Maret 2017, jumlah kemiskinan secara nasional sebesar 10,64%; di pedesaan 13,83% dan di perkotaan hanya 7,72% , sementara itu angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebesar 17,65% berada pada peringkat V dari sepuluh Provinsi di Indonesia yang angka kemiskinannya tertinggi, ([www.databoks.katadata.co.publish/2017/07/18](http://www.databoks.katadata.co.publish/2017/07/18), diakses tgl. 21 Januari 2018). Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih berada pada posisi di atas Provinsi Gorontalo bahkan hampir di atas dua kali lipat dari angka Nasional; hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Gorontalo**

No	Tahun	Angka Kemiskinan	Keterangan (%)
1.	2015	21,08%	
2.	2016	21,03%	Turun 0,50
3.	2017	20,55%	Turun 0,58
4.	2018	19,84%	Turun 0,71

Sumber: Harian Gorontalo Post, tgl.15 Februari 2019.

Meski terjadi penurunan selama empat tahun terakhir sebesar 1,79% sesuai pada tabel di atas, namun masih tetap diperlukan komitmen pemerintah untuk mengangkat derajat kehidupan penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan ialah secara konsisten meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat miskin, melalui ... serta mengintensifkan bantuan dan subsidi untuk meningkatkan derajat kualitas hidup agar penduduk miskin secara perlahan dapat keluar dari kubangan kemiskinan (Azis, Harry Azhar: 2018).

Sementara itu sesuai hasil Konsultasi Regional Penduduk Domestik Regional Bruto se Sulawesi, Maluku dan Papua dilaksanakan bulan Maret 2018 antara lain dikemukakan terjadi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo untuk dua tahun terakhir menurun yaitu Maret 2018 sebesar 2,67 dan 0,52 lebih rendah dibanding Maret 2017 sebesar 4,68 dan 1,42 (dalam Cahyono, 2019:5). Oleh karena itu sangat dituntut peran masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dengan cara ini pembangunan dilangsungkan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan kesadaran inilah kita bisa menghasilkan rencana-rencana yang membumi, yakni melekat pada keadaan masyarakat yang akan menjadi subyek maupun oyek pembangunan itu sendiri (Sumaryadi, tt: 25)



Bertolak dari pernyataan-pernyataan di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Partisipasi Masyarakat Desa sebagai Moderating Variabel Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Gorontalo.

## LANDASAN TEORI

### A. Pengentasan Kemiskinan

#### 1. Pengertian Kemiskinan

Kata dasar kemiskinan adalah “miskin”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi baru (2012:581), miskin artinya adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, papa, sangat melarat. Dalam bahasa Inggris, orang miskin diistilahkan dengan *poor* yang artinya miskin, malang, lemah, (Echols, Jon M dan Shadili, Hasan; 1995:438).

Sebagaimana oleh Stevenson, (2010) dikatakan miskin sebagai *having a money few possession; not having enough money for the basic things that people ned to live properly*, yang maksudnya tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal dasar bahwa orang perlu untuk hidup dengan benar.

Kata miskin sebagai kata benda dengan diberi awalan ke dan akhiran an sehingga berubah menjadi kata sifat yakni kemiskinan yang berarti suatu kondisi seseorang atau kelompok tertentu yang tidak memiliki kemampuan materi dalam hidupnya. Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam faktor produksi sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan (Subandi, 2016:78).

Suharto, Edi (2017:132) dengan mengutip pendapat SMERU, bahwa kemiskinan mempunyai beberapa ciri:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b) Ketiadaan akses terhadap hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d) Kerentanan terhadap gencangan yang bersifat individual maupun massal.
- e) Rendahnya kuliatas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- f) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharianyang berkesinambungan.
- h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena kemiskinan cacat fisik maupun mental.
- i) Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dari sembilan ciri yang dikemukakan di atas maka dapat dsimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketiadaan yang bersifat multidimensional dalam kehidupan penduduk miskin.

#### 2. Penyebab dan Upaya Pengentasan

Menurut identifikasi Kuncoro (2003:131), penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu: a). secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola



kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; b). kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia; c). kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

David Cox (2004:1-6) membagi penyebab kemiskinan atas empat dimensi yakni sebagai berikut:

- a) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi,
- b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan,
- c) Kemiskinan sosial,
- d) Kemiskinan konsekwensial.

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, berupa dominasi Negara-negara maju terhadap Agar tercipta pengentasan serta pemberantasan kemiskinan, maka model kebutuhan dasar sebagai suatu strategi memenuhi lima sasaran pokok perlu diperhatikan. Kelima strategi adalah sebagai berikut:

- a. Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, pandang atau perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu.
- b. Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, program preventif dan kuratif kesehatan air minum, pemukiman dengan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi, baik rural maupun urban.
- c. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- d. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, ataupun dari menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya,
- e. Menjamin adanya partisipasi masa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek (Green, 1978:7 dan Dorodjatun Koentjoro-Jakti 1978:15).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Harian Gorontalo Post (2019:7) memberikan 3 (tiga) rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Gorontalo, pertama akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi untuk memfasilitasi pembentukan modal dan peningkatan nilai tambah serta penguatan potensi sector pertanian, Kedua, penyelenggaraan perlindungan sosial, perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ke penduduk miskin serta peningkatan kapasitas ekonomi produktif melalui program pembukaan akses pasar dan keuangan. Ketiga, penyediaan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

## **B. Perencanaan Pembangunan Desa**

### **1. Pengertian Perencanaan**

Administrasi sebagaimana diketahui adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dari makna istilah administrasi ini terdapat dua kelompok orang yakni kelompok pemimpin dan kelompok yang dipimpin untuk mengeksekusi pencapaian tujuan dalam organisasi baik privat maupun publik. Menurut George Terry (1964) *“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human*



*being and other resources*; manajemen adalah proses yang bersifat khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

Selain dua pendapat di atas dapat dikemukakan batasan dari pakar administrasi dalam negeri yakni Prayudi Admosudirdjo (1982) manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Bertolak dari batasan-batasan manajemen di atas nampak jelas bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen sebelum memulai suatu aktivitas dalam organisasi pemerintah atau publik. Sebagai fungsi utama manajemen, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan di kemudian hari, siapa yang akan mengerjakan, kapan dikerjakan, di mana dikerjakan, sumber daya apa yang dipergunakan serta dengan metode apa mengerjakannya. Semua organisasi baik privat maupun public agar berhasil dalam pencapaian tujuan organisasinya tak lepas dari fungsi perencanaan tersebut.

Koontz dkk (1988:121) mengemukakan hakikat perencanaan atas empat prinsip utama yakni: kontribusi kepada tujuan dan sasaran, aspek primer dari perencanaan, aspek daya serap perencanaan dan efisiensi rencana.

- a. Kontribusi kepada tujuan dan sasaran dari setiap rencana dan semua rencana derivative adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini seperti dikemukakan oleh Soejadi dalam Syafiie (2010:75) bahwa perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Aspek primer dari perencanaan dimaksudkan bahwa aspek penting, seperti pengalokasian sumber daya baik alam, uang maupun manusia akan digunakan dalam proses mencapai tujuan; pengkoordinasian, pengarahan yang akan dilakukan serta bentuk dan tenik pengawasan selama kegiatan pencapaian tujuan berlangsung.
- c. Aspek daya serap perencanaan dimaksudkan adalah sejauh mana capaian tujuan setiap rencana baik capaian yang bersifat kuantitatif (target) maupun kualitatif (jangka menengah dan panjang).
- d. Aspek efisiensi perencanaan di mana rencana tersusun dengan memperhatikan secermat mungkin penghematan sumber daya dan dana sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berlangsung secara efektif dan efisien serta ekonomis.

## 2. Langkah-langkah Penyusunan Rencana

Agar rencana tersusun dengan baik serta dapat diterapkan maka penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut (Siagian, 2004: 93):

- a. *Know the nature of the problem,*
- b. *Collecting data,*
- c. *analysis of the data*
- d. *determination of several alternatives*
- e. *selection of the seemingly best way from among alternatives*
- f. *execution*
- g. *evaluation of result*



*Know the nature of the problem* adalah mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi. Diterapkan dalam bidang perencanaan, hal ini berarti bahwa pimpinan organisasi harus mengetahui kenapa rencana harus disusun. Charles F. Kettinger, seorang indistriawan amerika yang terkenal, pernah berkata bahwa sesuatu masalah yang hakikatnya telah diketahui separo terpecahkan. Merencanakan tidak boleh dilaksanakan hanya sekedar merencanakan saja karena kegagalan rencana itu terlihat dalam hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan.

*Collecting data* (kumpulkan data-data) yang dimaksud dengan data-data di sini ialah:

- a) Fakta-fakta yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai
- b) informasi dari unit organisasi yang lebih rendah
- c) saran dari para anggota organisasi, terutama mereka yang nantinya akan menjadi pelaksana rencana.
- d) ide bawahan yang mungkin sangat berharga dalam pembuatan rencana.
- e) kritik dari dalam dan luar organisasi.

*Analysis of the data* adalah data hanya mempunyai arti apabila data itu diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

*Determination of several alternatives* adalah hasil penganalisisan data-data yang biasanya akan menunjukkan beberapa alternative yang dapat ditempuh dalam menghasilkan sesuatu. Pimpinan organisasi harus mempertimbangkan dengan teliti kebaikan-kebaikan dan keburukan setiap alternative untuk tiba kepada kesimpulan alternatif mana yang kiranya akan merupakan kemungkinan yang paling menguntungkan untuk di tempuh.

*Selection of the seemingly best way from among alternatives* adalah hasil pemikiran dan analisis yang matang tentang setiap alternative harus memungkinkan pimpinan memilih salah satu alternative yang ada. Yang dipilih tentunya alternatif yang kelihatannya terbaik.

*Execution* adalah diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan berarti pembuatan rencana sendiri.

*Evaluation of result* adalah biasanya suatu rencana yang telah dibuat sebelum dilaksanakan oleh susunan organisasi, terlebih dahulu diadakan percobaan dalam bentuk sederhana (pre-test). Hasil dari percobaan ini dianalisis untuk melihat apakah sudah sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan tujuan.

### 3. Jangka Waktu Rencana Pembangunan Desa

Secara teori Jangka waktu perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi tiga, yakni: a) perencanaan jangka panjang, b) perencanaan jangka menengah, c) perencanaan jangka pendek (Widodo: 2006:42, Sjafrizal; 2015:38, Mulyana: 2011:4).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa jangka waktu perencanaan pembangunan adalah tiga tahapan yang terdiri dari: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan. (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. (2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan



Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa**

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*", yang berarti pengambilan bagian. Pengertian tadi maka partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keturutsertaan sejumlah orang yang terhimpun dalam suatu wilayah untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat desa, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat (Isbandi 2007:27).

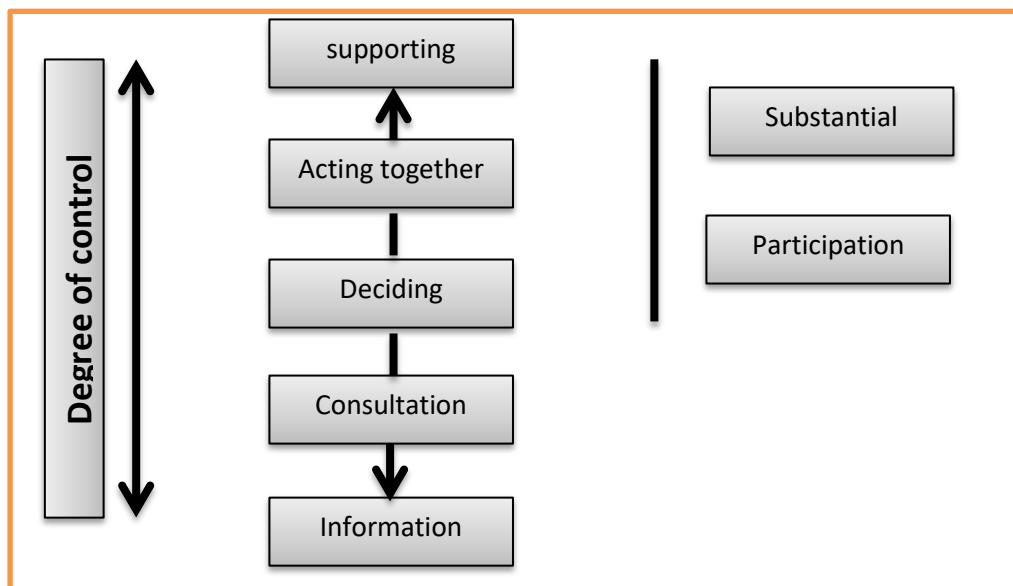
Berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa melalui otonomi desa atau rombuk desa makna pedesaan lebih mengutamakan nilai-nilai batin ialah: rasa persaudaraan, tanggung jawab bersama, kasih sayang dengan tujuan pokok: keselamatan dan kesejahteraan bersama daripada kemajuan lahiriah (Utomo 2003: 174). Didalam kerangka perumusan dan pelaksanaan otonomi desa dan rombuk desa, kita diingatkan untuk jangan membinasakan, mematikan nilai-nilai batin yang bertujuan luhur itu. (Utomo 2003:175) Dalam otonomi desa/rombuk desa membahas tentang *public interest* yakni dengan memasukan baik kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat umum dan juga hendaknya memberikan keseimbangan pada kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan pemerintahan (Thoha, 2002:82).

Penyusunan dan pembahasan rencana pembangunan desa dilaksanakan melalui forum Musrenbang yang dihadiri oleh Ketua RT/RW, Kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua adat, Keompok perempuan, kelompok pemuda, oranisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain (Ma'ruf, M.: 2005).



Wilcox dalam Mardikanto dan Soebiato (86:2017) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi (*information*)
- 2) Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.



Gambar 1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi mengenai pengaruh penyusunan rencana pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan dengan variable partisipasi masyarakat sebagai variable moderating. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menguraikan secara tuntas dan jelas mengenai karakteristik permasalahan atau fenomena yang di hadapi. Sedangkan penelitian yang bersifat verifikatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis. Untuk itu metode yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan variabel pada populasi tersebut.





Periode waktu yang digunakan adalah *cross section* yaitu sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (X1)

Variabel Penyusunan Rencana Pembangunan Desa yang dijadikan acuan adalah teori dari Siagian yang menyatakan bahwa variabel ini dapat diukur dengan tujuh indikator yakni, 1). Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi (*know the nature of th problem*). 2). Kumpulkan data-data (*collecting data*), 3). Penganalisaan data-data (*analysis of the data*). 4). Penentuan beberapa alternatif (*determination of several alternatives*). 5). Memilih cara yang kelihatannya terbaik (*selection of the seemingly best way from among alternatives*). 6). Pelaksanaan (*execution*, 7). Penilaian hasil yang dicapai (*evaluation of result*).

Secara deskriptif jawaban responden terhadap indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Deskriptif Variabel Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (X1)**

Variabel	Perny.	Alternatif Jawaban					Skor			Ket.
		1	2	3	4	5	Aktual	Ideal	(%)	
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (X1)	1	1	1	37	44	0	290	420	69.05	Baik
	2	1	1	36	46	0	295	420	70.24	Baik
	3	2	1	35	46	0	293	420	69.76	Baik
	4	1	6	31	46	0	290	420	69.05	Baik
	5	3	1	15	64	0	306	420	72.86	Baik
	6	3	3	29	48	0	288	420	68.57	Baik
	7	5	9	30	40	0	273	420	65.00	Cukup
T_V		16	22	213	334	0	2035	2940	69.22	Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Sesuai tabel diatas dapat diinterpretasi jawaban responden bahwa penyusunan rencana pembangunan desa pada umumnya telah terlaksana dengan baik, dimana dari enam pernyataan/pertanyaan menunjukkan persentasi “baik”, atau rata-rata sebesar 69,22%, kecuali satu pernyataan/pertanyaan (nomor 7) dijawab responden “cukup”.

### 2. Partisipasi Masyarakat Desa (X2)

Variabel partisipasi masyarakat desa yang diacu dari teori Wilcox, variabel ini dapat diukur dengan indikator seperti a. Memberikan informasi, b. Konsultasi, c. Pengambilan keputusan bersama, d. Bertindak bersama, e. Memberikan dukungan.

Secara deskriptif jawaban responden terhadap indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3**  
**Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat Desa (X2)**

Variabel	Perny.	Alternatif Jawaban					Skor			Ket.
		1	2	3	4	5	Aktual	Ideal	(%)	
Partisipasi Masyarakat Desa(X2)	1	1	4	25	54	0	300	420	71.43	Baik
	2	2	1	35	46	0	293	420	69.76	Baik
	3	0	11	23	50	0	291	420	69.29	Baik
	4	3	6	25	50	0	290	420	69.05	Baik
	5	1	6	32	45	0	289	420	68.81	Baik
	T_V	7	28	140	245	0	1463	2100	69.67	Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa perangkat pemerintah desa, BPD, LMP, dan tokoh masyarakat desa di kabupaten Gorontalo pada umumnya bersedia berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden pada item pertanyaan nomor 1 sd 5 yang lebih banyak menjawab “baik” atau “setuju” yakni rata-rata sebesar 69.67%; yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

### 3. Pengentasan Kemiskinan (Y)

Variabel pengentasan kemiskinan yang diacu dari teori Brojonegoro variabel ini dapat diukur dengan indicator-indikator yang terdiri dari 1). Perbaikan iklim investasi, 2). Perluasan akses layanan dasar, dan 3). Infrastruktur.

Secara deskriptif jawaban responden terhadap masing-masing indicator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Deskriptif Variabel Pengentasan Kemiskinan (Y)**

Variabel	Perny.	Alternatif Jawaban					Skor			Ket.
		1	2	3	4	5	Aktual	Ideal	(%)	
Pengentasan Kemiskinan (Y)	1	1	2	21	59	0	304	420	72.38	Baik
	2	1	1	21	60	0	306	420	72.86	Baik
	3	1	1	24	58	0	307	420	73.10	Baik
	4	1	1	27	55	0	304	420	72.38	Baik
	5	2	2	37	43	0	289	420	68.81	Baik
	6	2	0	28	54	0	302	420	71.90	Baik
	T_V	8	7	158	329	0	1812	2520	71.90	Baik

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Sesuai tabel diatas nampak bahwa jawaban responden terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten Gorontalo pada umumnya telah dilakukan dengan baik. Hal ini



dari lima pernyataan/pertanyaan tentang aspek pengentasan kemiskinan dijawab oleh responden dengan “baik” atau rata 71% lebih.

#### 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pengujian hipotesis menggunakan uji-t untuk pengujian secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dan uji-F untuk menguji simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

##### 1) Hasil Pengujian Parameter Simultan (Uji-F)

Untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji-F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah penyusunan rencana pembangunan dengan partisipasi masyarakat desa sebagai variabel moderating secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo. Pengujian dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel atau dengan melihat tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Berikut tabel hasil pengujiannya.

**Tabel 16**  
**Hasil Pengujian Parameter Simultan**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154.468	3	51.489	6.537	.001 <sup>a</sup>
	Residual	630.104	80	7.876		
	Total	784.571	83			

a. Predictors: (Constant), Moderasi, Peny.Renc.Pemb.Des, Part.Masy.Des

b. Dependent Variable: Pengentasan\_Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji-F pada tabel diatas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 6,537 dengan nilai *probability* sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan menerima H<sub>A</sub> yang berarti penyusunan rencana pembangunan dengan partisipasi masyarakat desa sebagai variabel moderating secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo.

#### 5. Hasil Pengujian Parameter Individual (Uji-t)

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga dalam penelitian ini dilakukan dengan uji-t dengan untuk melihat pengaruh langsung X1 terhadap variabel dependen dan uji interaksi antara X1 dan X2 terhadap variabel dependen membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan tingkat probabilitas lebih kecil nilai alpha 0,05 maka dapat dikatakan ada pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Namun sebaliknya jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dengan tingkat probabilitas lebih besar dari nilai alpha



0,05 maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Adapun nilai  $t_{\text{-tabel}}$  dalam penelitian ini yaitu 1,98969 yang diperoleh dengan rumus  $df = n - k - 1$  ( $84 - 2 - 1 = 81$ ) (lihat lampiran). Berikut table hasil pengujian.

**Tabel 17**  
**Hasil Uji Parameter Individual**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	8,913	2.691		3.312	.001
Rencana_Pemb.Des a	.469	.161	.428	2.924	.004
Part.Masy.Des	.093	.223	.062	.420	.676
Renc.Pemb.Des_Pa rt.Masy.Des	.017	.004	.469	4.807	.000

Dependent Variable: Pengentasan\_Kemiskinan

Berdasarkan table hasil pengujian diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai  $t$ -hitung sebesar 2,924 dimana nilai tersebut lebih besar dari  $t$ -tabel 1,98969 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo.
- Hasil pengujian variabel partisipasi masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo diperoleh nilai  $t$ -hitung sebesar 0,420 dimana nilai tersebut lebih kecil dari  $t$ -tabel 1,98969 dengan nilai signifikansi sebesar 0,676 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan secara parsial partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo.
- Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji apakah penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada partisipasi masyarakat desa yang tinggi pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai  $t$ -hitung sebesar 4,807 dimana nilai tersebut lebih besar dari  $t$ -tabel 1,98969 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang berarti penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada partisipasi masyarakat desa yang



tinggi pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat desa dapat memoderasi pengaruh penyusunan rencana pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan tabel pengujian diatas, maka persamaan yang dihasilkan dari hasil pengujian sebagai berikut.

$$Y = 8,913 + 0,469X_1 + 0,093X_2 + 0,017X_1 \cdot X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1). Nilai konstanta sebesar 8,913 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas maka nilainya adalah sebesar 8,913.
- 2). Nilai koefisien regresi variabel penyusunan rencana pembangunan desa ( $X_1$ ) terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo ( $Y$ ) dapat diinterpretasikan sebesar 0,469 atau sebesar 46,9% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dapat dipengaruhi oleh penyusunan rencana pembangunan desa sebesar 46,9%.
- 3). Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat desa ( $X_2$ ) terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo ( $Y$ ) dapat diinterpretasikan sebesar 0,093 atau sebesar 9,3% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa sebesar 9,3%.
- 4). Nilai koefisien interaksi antara variabel penyusunan rencana pembangunan desa ( $X_1$ ) dengan variabel partisipasi masyarakat desa ( $X_2$ ) terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dapat diinterpretasikan sebesar 0,017 atau 1,7% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan terhadap upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dapat dipengaruhi oleh variabel penyusunan rencana pembangunan desa yang diikuti dengan adanya partisipasi masyarakat desa sebesar 1,7%.

#### 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai  $R^2$  sama dengan 0, berarti tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $R^2$  sama dengan 1, berarti persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna (Ghozali, 2013: 138). Berikut hasil pengujian.



**Tabel 18**  
**Uji Determinasi R<sup>2</sup>**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 <sup>a</sup>	.197	.167	2.80647

a. Predictors: (Constant), Moderasi, Peny.Renc.Pemb.Des, Part.Masy.Des

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, diperoleh hasil koefisien determinasi nilai R sebesar 0,444 atau sebesar 44,4% yang berarti antara variabel independen dengan variabel dependen mempunyai hubungan yang cukup besar. Kemudian nilai *Adjusted R<sub>square</sub>* 0,167 atau sebesar 16,7%. Hal ini berarti bahwa variabel penyusunan rencana pembangunan desa, variabel partisipasi masyarakat desa, dan interaksi antara penyusunan rencana pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat desa mampu menjelaskan tentang pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo sebesar 16,7%. Sedangkan sisanya sebesar 83,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Pengentasan Kemiskinan, dengan Partisipasi Masyarakat Desa Sebagai Variabel Moderasi.

Pengujian hipotesis pertama yang berbunyi: Penyusunan rencana pembangunan dengan partisipasi masyarakat desa sebagai variabel moderating secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, diperoleh hasil koefisien determinasi nilai R sebesar 0,444 atau sebesar 44,4% yang berarti antara variabel independen dengan variabel dependen mempunyai hubungan yang cukup besar.

Ini dapat dikatakan bahwa nilai determinasi sebesar 44,4% merupakan variasi pengentasan kemiskinan pada perangkat pemerintah desa di kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan oleh interaksi rencana pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama.

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firyal Akbar (2018), dan juga penelitian yang oleh Pertiwi (2014), dan Pratama (2014) yang menyatakan partisipasi masyarakat desa memoderasi pengaruh dalam penyusunan rencana pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan.

Perencanaan pembangunan desa yang ideal dilakukan oleh masyarakat desa sendiri secara partisipatif, karena masyarakat desalah yang jauh lebih tahu dan mengerti apa masalah yang sesungguhnya di desanya, dan potensi apa yang bisa digali untuk dikembangkan demi kemajuan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan sumber daya alam desa serta menggunakan bahan baku yang ada di desa. Dokumen Besar Perencanaan Desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Sebagai dokumen besar, rancangan



RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Home / Pojok Desa / Terpopuler Gampong RT 09.20) di akses tgl. 20 Noember 2019).

## 2. Pengaruh Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah penyusunan rencana pembangunan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,924 dimana nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1,98969 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi *alpha* 0,05.

Nilai koefisien regresi variabel penyusunan rencana pembangunan desa (X1) terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo (Y) dapat diinterpretasikan sebesar 0,469 atau sebesar 46,9% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dapat dipengaruhi oleh penyusunan rencana pembangunan desa sebesar 46,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh penyusunan rencana pembangunan desa pada pemerintah desa di kabupaten Gorontalo.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ladua, Rompas dan Ruru (2016), serta penelitian yang dilakukan oleh Wilar, Posumah dan Sondakh (2017). Hal ini pula sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safrizal (2015), Muljana (2011) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah, dan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## 3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat desa (X2) terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo (Y) dapat diinterpretasikan sebesar 0,093 atau sebesar 9,3% yang dapat dideskripsikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa sebesar 9,3%.

Dengan hasil pengujian tersebut, bahwa hipotesis ketiga dari penelitian ini yang berbunyi “Partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintah desa di kabupaten Gorontalo”, dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lombok (2018), Susetiawan Dkk (2017), dan Asri (2009) pada prinsipnya memandang penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa selama lima tahun terakhir terjadi penurunan angka kemiskinan rata-rata, 72% pertahun sehingga pada tahun 2018 berada pada angka 19,84% angka kemiskinan di kabupaten Gorontalo, meski angka ini masih jauh berada di atas rata-rata nasional yakni, 9,41%, dan Provinsi Gorontalo pada angka 15,83% (Gorontalo Post, 2019).



Volume : 06

Nomor : 01

Bulan : Januari

Tahun : 2020

<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>

## KESIMPULAN

Bertolak dari uraian-uraian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaruh penyusunan rencana pembangunan desa terhadap pengentasan kemiskinan dimoderasi oleh partisipasi masyarakat, diperoleh hasil bahwa interaksi penyusunan rencana pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel penengah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
2. Penyusunan rencana pembangunan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan yang berarti bahwa dengan terakomodir dalam rencana pembangunan desa maka upaya pengentasan kemiskinan akan teratasi dengan baik.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yang berarti bahwa upaya pemberantasan kemiskinan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi tugas dan tanggung jawab masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, dkk. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah, Indonesia. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018
- Asri (2009) .Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Jurnal Tabularasa, 6 (2). Universitas Negeri Medan.
- Cahoyono, Rudi.2019. Menakar Kualitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Harian Gorontalo Post.Gorontalo.
- Echols, John dan Shadili 1995, Kamus Bahasa Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary. Penerbit PT Gramedia.
- Hakim, 2017. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Jurnal Politik Indonesia, Vol.2. No.2.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press
- Keith, Davis & John, W. Newstrom. 1989. Human Behaviour At Work. Mc-Graw-HillBook Company. New York
- Kuncoro Mudrajat. 2010. Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan. Airlangga. Jakarta
- Koontz, O'Donnel, Weihrich. 1987. Manajemen.Jilid 1. Edisi ke delapan. Airlangga. Jakarta
- Ladua dkk. • 2016 Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Journal article Jurnal Administrasi Publik UNSRAT
- Maaruf H. Moh, Indrawati Sri Mulysni. 2005. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. CV. Citra Utami. Jakarta





- Makalalag. 2013. Efektifitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa di kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mondondow".Journal article Jurnal Administrasi Publik UNSRAT
- Mardikanto, Totok, Soebiarto Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. CV.Alfabeta. Bandung
- Muljana, B.S.2011. Perencanaan Pembangunan Nasional. Universitas Indonesia Jakarta
- Nicholas Henry. 2004. Public Administration And Public Affrais. Prentice-Hall Of India New Delhi
- Pratama. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. Juornal vol.4 no.2. 2014, sensi, manajemen bisnis
- 2014.Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal pandecta, vol.9.no.2.2014 fak.hukum unnes
- Pomalingo, Nelson. 2019. Hut 346 Kabupaten Gorontalo, Angka Kemiskinan Nyaris 20 %. Harian Gorontalo Post
- Susetiawan dkk. 2017. Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM. \*pspk\_ugm@yahoo.com
- Sumardi, Mulyanto. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Cv. Rajawali Jakarta
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarkat. Penerbit Citra Utama. Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Derah. Jakarta: SUN Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Totok, Mardikanto, Soebiato, Poerwoko.2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.
- Riduwan. 2008. Metode dan Penyusunan Tesis. Alfabeta Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta
- Saleh Karim. 2004. Otonomi Desa Globalisasi Ekonomi Memiskinkan Rakyat Atau Memakmurkan Rakyat. Universitas Hasanudin. Makassar
- Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Subandi. 2016. Ekonomi Pembangunan. CV. Alfabeta, Bandung
- Suharto Edi. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Revika Adimata. Bandung
- Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sumardi, Mulyanto. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Cv. Rajawali Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Moeliono M. Anton. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
- Thoha Mifta. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Predana Media Group Jakarta
- Triwidodo.2006. Perencanaan Pembangunan Aplkasi Computer Era Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN Yogyakarta



Volume : 06

Nomor : 01

Bulan : Januari

Tahun : 2020

<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>

- Umar Husein. 2010. Desain Penelitian MSDM Dan Perilaku Karyawan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Utomo, Warsito. 2003. Dinamika Administrasi Publik. Program Magister Administrasi Publk. Jogjakarta
- Wilar dkk. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Journal article Jurnal Administrasi Publik UNSRAT .
- Yuniarsih Tjutju, Suwatno. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV. Alfabeta. Bandung.